

KIC
Pid 05/01
War
k

SKRIPSI

RIMAWATI ENDAH ING WARNI

**KEWENANGAN TNI AL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT ATAS TINDAK
PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 24
AYAT (3) UU NO 6 TAHUN 1996 TENTANG PERAIRAN INDONESIA)**



STAMP: SURABAYA

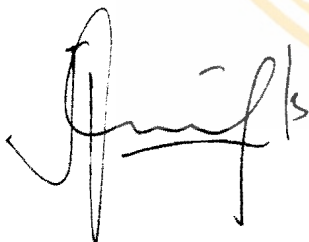
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2001**

**KEWENANGAN TNI AL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LAUT
ATAS TINDAK PIDANA PERIKANAN DI INDONESIA
(TINJAUAN YURIDIS PASAL 24 AYAT (3) UU No. 6 TAHUN 1996
TENTANG PERAIRAN INDONESIA)**

SKRIPSI

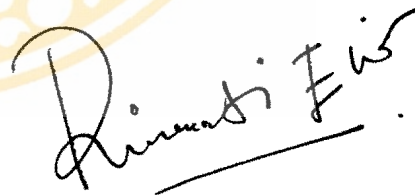
**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) BIDANG ILMU HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
NIP. 131653449

Penyusun,



Rimawati Endah Ing Warni
NIM. 039714512

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2001.**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. H. Abdoel Rasyid, S.H., LL.M.

Anggota : 1. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

2. Eman Ramelan, S.H., M.S.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembagian wilayah perikanan Indonesia telah menimbulkan sebuah konsekuensi yuridis, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum serta instansi/aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana perikanan. Masalah pemberlakuan hukum terkait dengan peraturan-peraturan hukum yang dapat diterapkan bila terjadi tindak pidana di bidang perikanan, baik itu peraturan hukum yang bersifat nasional maupun peraturan hukum yang bersifat internasional. Dalam penerapan hukum dibutuhkan suatu dasar hukum yang dapat mengikat semua pihak yang terkait, dan dasar hukum itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan yang bersifat internasional, sehingga bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi.
- b. Hal yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan adalah kewenangan penyidikan oleh aparat/instansi yang berwenang. Tindak pidana perikanan termasuk tindak pidana khusus, sehingga kewenangan penyidikannya juga menggunakan peraturan yang bersifat khusus, bukan peraturan yang bersifat umum. Asas yang digunakan dalam kasus ini adalah asas *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*. Dalam kasus KM gapura 09 telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara pihak POLRI dan TNI AL dalam hal penyidikannya, karena masing-masing instansi berpedoman

penyidikan, sehingga tidak terjadi koordinasi yang baik antara POLRI dan TNI AL. Akan tetapi dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 2, maka wewenang penyidikan di Perairan Indonesia adalah Perwira TNI AL, sehingga tidak lagi ada tumpang tindih kewenangan penyidikan seperti yang terjadi pada KM Gapura 09

2. Saran

- a. Penanganan/proses hukum terhadap tindak pidana perikanan melibatkan sejumlah instansi terkait (TNI AL, POLRI, PPNS Perikanan, Kejaksaan, dan lain-lain). Untuk menghindari kekeliruan persepsi serta mencegah adanya tumpang tindih kewenangan, maka perlu koordinasi lintas sektoral antara berbagai instansi terkait sesuai fungsi tugas dan kewenangannya berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengefektifkan Bakorkamla. Hal ini demi menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut, serta menjamin keamanan dan ketertiban di laut yang kondusif dan dinamis.
- b. Pemerintah harus menyiapkan/ membuat produk perundang-undangan yang secara tegas mengatur kewenangan serta pola/bentuk koordinasi antar berbagai instansi terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kekeliruan/keragu-raguan bagi aparat di lapangan karena adanya kerancuan dan ketidakpastian dari berbagai produk perundang-undangan yang ada sebagaimana yang terjadi dalam kasus KM. Gapura 09.